

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2020

BADAN PENGHUBUNG

Jl. Kembang I No.1 Kwitang DKI Jakarta



**PEMERINTAH
KALIMANTAN TENGAH**

KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur Kehadirat Allah *Subhaanahuwata'aala* atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020 Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dalam kegiatan kinerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta selama tahun 2020, yang terukur dalam rencana strategik, kinerja tahunan, pengukuran kinerja dalam kegiatan, dan capaian sasaran dengan akuntabilitas kinerja.

Disamping itu kami menyadari bahwa sajian buku laporan ini masih belum sempurna seperti apa yang diharapkan, untuk itu kami mengharapkan masukan, saran dan kritik untuk membangun penyempurnaan penyusunan laporan kinerja yang akan datang.

Demikian laporan ini kami susun agar dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Februari 2021

 **KEPALA BADAN,**
SAWUN, S.Sos, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19700101 199303 1 021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Tahun 2020 merupakan salah satu perwujudan pertanggungjawaban Pemerintah kepada pemberi mandat dan stakeholders atas kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 khususnya menyangkut bidang Pelayanan.

Materi LKIP berorientasi pada analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Analisis memuat informasi mengenai keberhasilan dan juga hambatan-hambatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat dicarikan solusinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat mendorong transparansi kegiatan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta didalam mewujudkan Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja secara professional agar terwujud suatu kinerja yang baik melalui kegiatan hubungan antar lembaga, pembinaan masyarakat daerah, melakukan promosi dan pemberian informasi yang akurat serta koordinasi dan Fasilitasi Promosi, Informasi dan Komunikasi sebagai wadah memperkenalkan seni budaya dan objek pariwisata.

Secara umum pencapaian sasaran kinerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta untuk tahun 2020 cukup baik meskipun belum maksimal. Keberhasilan yang dicapai tidak lepas dari komitmen seluruh jajaran Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, serta dengan adanya dukungan, koordinasi dan sinergitas dari pihak-pihak terkait. Sedangkan hal-hal lain yang masih belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Keterbatasan anggaran ini menyebabkan adanya beberapa kegiatan yang mengalami pengurangan target, penundaan, bahkan sampai pada penghapusan.

Kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai ini telah memberikan manfaat yang sangat berharga untuk menjadi sebuah pelajaran dalam lebih meningkatkan kinerja dimasa-masa yang akan datang.

Semoga laporan ini memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dapat menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. DASAR HUKUM.....	3
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
D. LINGKUNGAN STRATEGIS ORGANISASI.....	9
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	 12
A. VISI DAN MISI.....	14
B. TUJUAN DAN SASARAN.	15
C. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	18
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.....	21
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 32
A. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA.....	34
B. ASPEK KEUANGAN.....	42
 BAB IV PENUTUP.....	 48
A. KESIMPULAN.....	49
B. SARAN.....	49
 LAMPIRAN	 52

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Meningkatnya kritisi masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah, dalam masa era reformasi dan demokratisasi dewasa ini, merupakan salah satu indikasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu perlu ditindaklanjuti dengan meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang mengakomodasikan partisipasi stakeholder secara berimbang (*Good Governance*).

Paradigma lama bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah dengan kemampuan internal dalam menggunakan anggaran secara tidak relevan.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Azas Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang telah disebutkan diatas, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah DI Jakarta diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah DI Jakarta Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari Pencapaian Kinerja, Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Sasaran dengan Target yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Tahun 2020 ini disusun berdasarkan beberapa landasan ukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1622);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 Tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Keberadaan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, administrasi, tatalaksana,

keprotokolan pimpinan daerah di Jakarta dan melakukan Hubungan Antar Lembaga sebagai penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Non Pemerintah, Kedutaan Negara sahabat di Jakarta, membina hubungan masyarakat, pelajar/mahasiswa Kalimantan Tengah yang berada di Jakarta dan melaksanakan Promosi, Komunikasi Informasi dan Potensi Kalimantan Tengah di Tingkat Nasional dan Internasional serta mengelola perlengkapan aset dan mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta. Dimana mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan, Administrasi, Tatalaksana, Keprotokolan Pimpinan Daerah di Jakarta dan melakukan Hubungan Antar Lembaga sebagai penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Non Pemerintah, Kedutaan Negara sahabat di Jakarta;
2. Merumuskan kebijakan teknis bidang hubungan antar lembaga Pemerintah dan Swasta;
3. Membantu Gubernur dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi hubungan antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah lainnya misi diplomatic dan instansi lainnya;
4. Melaksanakan pelayanan protokoler Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu daerah di Jakarta;
5. Memfasilitasi kegiatan promosi daerah;
6. Memberikan pelayanan data dan informasi tentang Kalimantan Tengah kepada yang memerlukannya;
7. Melaksanakan Promosi, Komunikasi Informasi dan Potensi Kalimantan Tengah di Tingkat Nasional dan Internasional
8. Menjalin komunikasi dan hubungan kerjasama dengan paguyuban masyarakat dan Mahasiswa Kalimantan Tengah di Jakarta dan sekitarnya;

9. Koordinasi pengelolaan Anjungan Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia Indah;
10. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan Keuangan kantor; dan
11. Mengelola mess Pemerintah Provinsi-Kalimantan Tengah di Jakarta.

Berdasarkan fungsi tersebut diatas, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta mempunyai kewenangan:

1. Penghubung antar Pemerintah daerah dengan pemerintah, Lembaga pemerintah non departemen kedutaan asing dan instansi lainnya di Jakarta;
2. Memfasilitasi masyarakat daerah Kalimantan Tengah yang berada di Jakarta;
3. Pengumpulan dan pengolahan data atau informasi;
4. Penyediaan fasilitas kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata; dan
5. Pengelolaan Pendapatan Daerah (PAD) berupa Mess di Jalan Kembang I No.I Kwitang dan Mess Jalan Jambu No. 6 Menteng Jakarta Pusat.

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2016 disamping mempunyai seorang Kepala Badan, juga membawahi 4 (empat) sub unit eselon IV.a yang terdiri dari:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, tatalaksana analisis jabatan dan formasi jabatan, perlengkapan dan perbekalan serta urusan surat menyurat dan rumah tangga Kantor.

2. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian

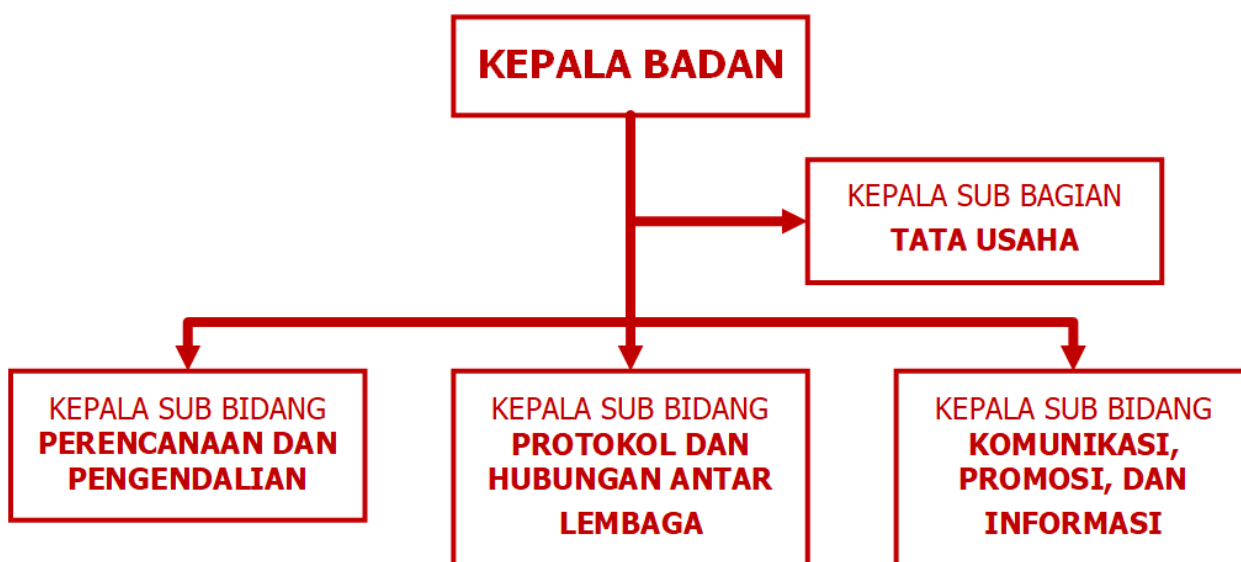
Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melakukan Penyiapan dan penyusunan rencana/program, melakukan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan rencana/program dan pelaporan.

3. Kepala Sub Bidang Protokol dan Hubungan Antar Lembaga

Kepala Sub Bidang Protokol dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memfasilitasi hubungan antar pemerintah daerah dengan pemerintah dan lembaga pemerintah non departemen dan swasta serta menjalin kerjasama dengan masyarakat daerah Kalimantan Tengah di Jakarta.

4. Kepala Sub Bidang Komunikasi, Promosi dan Informasi

Kepala Sub Bidang Komunikasi, Promosi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan promosi pembangunan daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata dan bekerjasama dengan Anjungan Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia Indah serta Kabupaten guna mengumpulkan dan mengolah data atau informasi.



Adapun jumlah pegawai pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah **45 orang** terdiri dari **15 orang**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 30 orang pegawai honorer/kontrak,
dengan rincian sebagai berikut:

a) Data pegawai berdasarkan golongan:

Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	Honorer	Jumlah
1	8	5	1	30	45

Data: tahun 2020

b) Data pegawai berdasarkan eselonering:

Eselon II.b	Eselon III.a	Eselon IV.a	Pelaksana	Jumlah
0	1	4	10	15

Data: tahun 2020

c) Data pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan:

Pasca sarjana (S2)	Sarjana (S1)	Sarjana Muda (DIII)	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
3	4	1	6	0	1	15

Data: tahun 2020

d) Data pegawai berdasarkan Diklat Penjenjangan:

Diklatpim IV	Diklatpim III	Diklatpim II	Jumlah
4	1	0	5

Data: tahun 2020

Optimalisasi Fungsi Institusi dan Tata Kerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta perlu ditingkatkan karena memegang peran penting dan strategis dalam mengatasi berbagai sektor Pelayanan yang harus terus berkembang, guna Peningkatan Pendapatan Daerah secara optimal. Dalam menjalankan tugas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, pelaksanaan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Fasilitasi dan Pelayanan. Kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Badan, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing, Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administrasi berada

Bersama-sama SOPD lain bertanggungjawab kepada Gubernur dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan SOPD, dalam melaksanakan tugas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

D. LINGKUNGAN STRATEGIS ORGANISASI

Secara geografis Provinsi Kalimantan Tengah terletak di garis Kathulistiwa pada posisi 111° -115° Bujur Timur dan 0°45' Lintang Utara – 3°30' Lintang Selatan. Kalimantan Tengah memiliki luas 157.983 km². merupakan daerah yang ke tiga terbesar setelah Papua dan Kalimantan Timur Berdasarkan sensus tahun 2010, provinsi ini memiliki populasi 2.202.599 jiwa, yang terdiri atas 1.147.878 laki-laki dan 1.054.721 perempuan. Sensus penduduk 2015, jumlah penduduk Kalimantan Tengah bertambah menjadi 2.680.680 jiwa. dengan perbandingan 48,66 % perempuan dan 51,34 % laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk bila dibandingkan dengan luas wilayah Kalimantan Tengah tergolong tidak padat yaitu 13 jiwa/km². Kalimantan Tengah mempunyai 13 kabupaten dan 1 kota.

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Di Jakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi sangat tergantung dan terikat kepada unsur-unsur lingkungan internal dan eksternalnya.

Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi maka analisis SWOT terhadap Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities) dan Tantangan (Threats) perlu dilakukan. Analisis SWOT ini juga berguna untuk mengetahui dimana keberadaan organisasi pada saat ini (*Where are now?*) yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar dalam pemilihan strategi dan kebijakan.

Kendala yang dihadapi terkait dari kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta meliputi:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strenghts*)

- ❖ Adanya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang TUPOKSI Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta maka Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan fasilitasi Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah lainnya, menyelenggarakan Protokoler, Promosi Daerah serta pembinaan paguyuban masyarakat Kalimantan Tengah di Jakarta memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta.
- ❖ Struktur organisasi pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta telah terisi oleh pejabat struktural dan staf yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Badan Penghubung dalam pemberian pelayanan umum.
- ❖ Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas—tugas Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta.

b. Faktor Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Tidak berfungsinya 1 (satu) pejabat struktural di Perencanaan dan Pengendalian dikarenakan dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya dalam fungsi administrasi tidak dilaksanakan dengan baik sehingga tugas dan fungsi administrsinya di kerjakan oleh pejabat struktural Sub Bagian Tata Usah dan pejabat struktural Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Promosi maka sangat mengganggu kinerja Badan Penghubung secara umum dan mempengaruhi etika pegawai di lingkungan Badan Penghubung dalam bekerja sehingga terjadinya konflik bawahan dengan atasan;
2. Kurangnya anggaran yang mengakibatkan Program dan Kegiatan fasilitasi pelayanan Pemerintah Daerah di Ibukota Negara tidak bisa terlaksana dengan baik;
3. Kurang Optimalnya promosi potensi daerah Kalimantan Tengah berupa Seni Budaya, Objek Wisata dan Sumber Daya Alam yang dapat menarik para Investor di wilayah 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota se-Kalimantan Tengah;
4. Belum terbangunnya Sistem Informasi Badan Penghubung Kalimantan Tengah;
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
6. Pemahaman terhadap aturan perundang-undangan masih rendah;
7. Masih kurangnya informasi/data akurat yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunities*)

1. Membangun Komunikasi antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Kedutaan (Negara Tetangga) serta Pemerintah Daerah dengan Pihak

Swasta untuk menarik visioner, berkomitmen dan berintegritas tinggi dalam menciptakan komunikasi yang berkelanjutan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Membangun koordinasi dan fasilitasi yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3. Bersinergi dengan Paguyuban Warga dan Mahasiswa/pelajar Kalimantan Tengah yang ada di Jakarta dan luar Jakarta di wilayah Indonesia;
4. membangun hubungan yang harmonis dengan SOPD lain dan lembaga Pemerintah Pusat, Lembaga-lembaga Tinggi Pemerintah dan Kedutaan Besar Negara Sahabat.

b. Faktor Tantangan (Threats)

1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintah daerah ke berbagai elemen dan masyarakat maupun ke pemangku kepentingan terhadap berbagai kebijakan;
2. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi yang berpengaruh pada pola pikir membangun koorsinasi dalam memfasilitasi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan membangun etika komunikasi dalam pola tindak pelayanan masyarakat sehingga menjadi lebih kritis;
3. Masih terdapat aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses pelayanan baik;
4. Belum adanya database Paguyuban Kalimantan Tengah, Warga dan Mahasiswa/pelajar Kalimantan Tengah yang ada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pentingnya rencana Kinerja merupakan langkah awal dalam siklus penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang memuat tentang Visi, Misi, Tujuan/Sasaran Strategis dan cara pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta maka Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, administrasi, tatalaksana, keprotokolan pimpinan daerah di Jakarta dan melakukan Hubungan Antar Lembaga sebagai penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Non Pemerintah, Kedutaan Negara sahabat di Jakarta, membina hubungan masyarakat, pelajar/mahasiswa Kalimantan Tengah yang berada di Jakarta dan melaksanakan Promosi, Komunikasi Informasi dan Potensi Kalimantan Tengah di Tingkat Nasional dan Internasional serta mengelola perlengkapan aset dan mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta.

Renstra Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta merupakan penjabaran arah dan tujuan Pembangunan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021.

2.1.VISI DAN MISI

Sebagai penjabaran visi Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri dan Adil serta memperhatikan visi Gubernur yaitu Meneruskan dan menuntaskan pembangunan Kalimantan Tengah agar rakyat lebih sejahtera dan bermartabat demi kejayaan negara kesatuan republik indonesia (NKRI), serta mengacu pada RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021, maka

dirumuskan Visi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta adalah :

**“MENJADI ORGANISASI MODEREN
YANG DILANDASI SEMANGAT ISEN MULANG
UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
KEPADA MASYARAKAT”.**

Sedangkan yang menjadi Misi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta adalah :

- a. Memberikan pelayanan prima di bidang ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar semakin profesional, disiplin dan bertanggung jawab;
- c. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan pelaporan pencapaian kinerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- d. Meningkatkan profesionalisme keprotokolan dan pelayanan mess.;
- e. Mengembangkan sistem pengelolaan barang daerah yang efektif, efisien dan fungsional.
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi potensi Kalimantan Tengah.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran/ implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada analisis strategis internal dan, eksternal dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s.d. 5 tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Badan

Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/ kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing-masing indikator dari program dan kegiatan).

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta. Kebijakan tersebut dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan dan sasaran Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

a. Misi Pertama

Memberikan pelayanan prima di bidang ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah.

Tujuan:

1. Mewujudkan ketatausahaan dan kearsipan kantor yang modern dan berkualitas.
2. Mewujudkan sarana dan prasarana kantor yang memadai dan mendukung kinerja organisasi.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah.

Sasaran:

1. Terwujudnya ketatausahaan dan kearsipan kantor yang modern dan berkualitas.
2. Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai dan mendukung kinerja organisasi.

3. Terjaminnya kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah.

b. Misi Kedua

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar semakin profesional, disiplin dan bertanggung jawab.

Tujuan:

Mewujudkan aparatur yang profesional dan disiplin melaksanakan tugas.

Sasaran:

Terwujudnya aparatur yang profesional dan disiplin melaksanakan tugasnya.

c. Misi Ketiga

Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan/barang dan pelaporan pencapaian kinerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tujuan:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah.
2. Mewujudkan sistem pelaporan pencapaian kinerja yang transparan dan akuntabel.

Sasaran:

1. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan barang yang efektifitas dan efisiensi.
2. Terwujudnya sistem pelaporan pencapaian kinerja yang transparan dan akuntabel.

d. Misi Keempat

Meningkatkan profesionalisme keprotokolan dan pelayanan mess.

Tujuan:

Mewujudkan pelayanan prima keprotokolan dan mess.

Sasaran:

1. Terwujudnya fasilitasi pelayanan prima keprotokolan.
2. Terwujudnya pelayanan mess Kalimantan Tengah di Jakarta setara dengan pelayanan hotel bintang 3.

e. Misi Kelima

Mengembangkan sistem promosi potensi Kalimantan Tengah.

Tujuan :

Mewujudkan promosi potensi Kalimantan Tengah di tingkat nasional dan Internasional.

Sasaran :

1. Terwujudnya Promosi potensi Kalimantan Tengah di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Fasilitasi promosi potensi Kalimantan Tengah berupa Seni Budaya dan Sumber Daya Alam dalam wilayah 13 Kabupaten dan 1 Kota.

2.3. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, administrasi, tatalaksana, keprotokolan pimpinan daerah di Jakarta dan melakukan Hubungan Antar Lembaga sebagai penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Non Pemerintah, Kedutaan Negara sahabat di Jakarta, membina hubungan masyarakat, pelajar/mahasiswa Kalimantan Tengah yang berada di Jakarta dan melaksanakan Promosi, Komunikasi Informasi dan Potensi Kalimantan Tengah di Tingkat Nasional dan Internasional serta mengelola perlengkapan aset dan mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, dimana tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel.1. Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta.

Bidang/Sektor	Sasaran RPJMD/Renstra	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
Bidang/Sektor Pelayanan	1. Memberikan pelayanan prima di bidang ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	<p>1.1. Terwujudnya ketatausahaan dan kearsipan kantor yang modern dan berkualitas.</p> <p>a. Laporan Keuangan</p> <p>b. Rekon Keuangan dan Aset</p> <p>1.2. Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai dan mendukung kinerja organisasi.</p> <p>1.3. Terjaminnya kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah.</p> <p>a. Tersedianya Kendaraan Dinas roda dua dan roda empat</p> <p>b. Aparatur yang selalu siap ditempat.</p> <p>c. Tersedianya Aplikasi berbasis web dalam rangka transparansi administrasi Pendapatan Daerah.</p>

Bidang/Sektor	Sasaran RPJMD/Renstra	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
	<p>2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar semakin profesional, disiplin dan bertanggung jawab.</p> <p>3. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan/barang dan pelaporan pencapaian kinerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.</p>	<p>2.1 Terwujudnya aparatur yang profesional dan disiplin melaksanakan tugasnya. a. Bimbingan Teknis Aparatur</p> <p>3.1. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan barang yang efektifitas dan efisiensi.</p> <p>3.2. Terwujudnya sistem pelaporan pencapaian kinerja yang transparan dan akuntabel.</p>

Bidang/Sektor	Sasaran RPJMD/Renstra	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
Bidang/Sektor Pelayanan	<p>4. Meningkatkan profesionalisme keprotokolan dan pelayanan Mess</p> <p>5. Mengembangkan sistem promosi potensi Kalimantan Tengah</p>	<p>4.1. Terwujudnya pelayanan prima keprotokolan.</p> <p>4.2. Terwujudnya pelayanan mess setara dengan pelayanan hotel bintang 3.</p> <p>a. Meningkatkan Target Pendapatan Daerah</p> <p>b. Fasilitas Kamar mess standar hotel</p> <p>5.1. Pelaksanaan</p> <p>a. pembuatan brosur</p> <p>b. kalender 2020</p>

2.4. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini sedangkan naskah asli bertanda tangan Gubernur dapat dilihat pada table berikut:

Tabel.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Trategis	Indikator	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran Tahun 2020
1	2	3	4	5
Mewujudkan Ketatausaha an dan Kearsipan kantor yang Modern dan Berkualitas			Pelayanan Administrasi perkantoran	2,335,673,000
	Terlaksananya Pendistribusia n Surat dan Barang	1 Tahun	Penyediaan Jasa surat-Menyurat	42,652,000
	Terselesainya Pembayaran jasa komunikasi, pemakaian listrik telpon dan air	1 Tahun	Penyediaan jasa komunikasi pemakaian listrik, telpon dan air	350,000,000
	Polis asuransi /pajak bumi bangunan gedung kantor/mess milik Pemprov Kalimantan Tengah	1 Tahun	Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah	90,000,000
	Tersusunnya dokumen pengelolaan administrasi keuangan dan jasa pengelolaan administrasi keuangan	1 Tahun	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	1,168,910,000
	Tersedianya alat kebersihan kantor	1 Tahun	Penyediaan jasa kebersihan kantor	50,000,000

	Tersedianya sejumlah alat tulis kantor dengan cukup	1 Tahun	Penyediaan alat tulis kantor	50,000,000
	Tersedianya sejumlah barang cetakan dan keperluan kantor	1 Tahun	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38,371,000
	Tersedianya komponen peralatan listrik, untuk kantor dan mess	1 Tahun	penyediaan komponen instalasi kantor	21,700,000
	Terselenggara nya pelaksanaan kerja dengan baik	1 Tahun	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	54,440,000
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30,000,000
	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat	1 Tahun	penyediaan makanan dan minuman	19,500,000
	Laporan Koordinasi tugas rapat koordinasi di provinsi	1 Tahun	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	420,100,000
Mewujudkan sarana dan prasarana kantor/mess yang memadai dan mendukung kinerja organisasi			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,830,244,500
	Tersedianya Kendaraan Operasional	1 Unit	Pengadaan Mobil Jabatan	767,348,000
	Terpeliharanya bangunan kantor/mess Pemerintah	1 Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	270,000,000

	Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta			
	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional di Jakarta	1 tahun	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	540,000,000
	Peralatan AC dan kursi tamu	1 Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	252,896,500
Mewujudkan aparatur yang profesional dan disiplin melaksanakan tugas kedinasannya.			Program Peningkatan Disiplin aparatur	20,000,000
	Tersedianya pakaian dinas bagi Resepsionis dan Satpam	45 orang	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	20,000,000
Mewujudkan aparatur yang profesional, disiplin & bertanggung jawab.			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000
	Terlaksananya pengisian PNS dan Tenaga Kontrak yang mengikuti Bimtek/Workshop/kursus singkat	45 orang	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	50,000,000
Mewujudkan pelayanan prima keprotokolan bagi pejabat Provinsi Dep/Lembaga Tinggi.			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	216,000,000
	Terlaksananya pelayanan protokol/koordinasi ke pusat	1 Tahun	Koordinasi dengan pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan	216,000,000

			pemerintah daerah lainnya	
Mewujudkan Pelaksanaan Promosi pariwisata Nusantara di dalam dan di luar Negri			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	60,000,000
	Terlaksannya promosi potensi 14 Kab/Kota Kalimantan Tengah.	14 Kab/Kota	Promosi pembangunan	60,000,000
JUMLAH				4,511,917,500

No.	Program	Anggaran (Rp.)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.335.673.000,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.830.244.500,-
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,-
4	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	216.000.000,-
5	Penyebaran Informasi Kehumasan dan Keprotokolan	60.000.000,-
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.000.000,-
	Jumlah	4.511.917.500,-

Total Anggaran Tahun 2020 untuk Program Prioritas berjumlah **Rp.4.511.917.500,-** (Enam Milyar Seratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). di tambah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.045.262.695,- sehingga semua anggaran tahun 2020 sebesar **Rp.9.185.612.695,-**

Penetapan kinerja tersebut mengalami perubahan nilai dalam program prioritas Total Anggaran Perubahan Tahun 2020 untuk Program Prioritas berjumlah **Rp 4,737,862,964,-** (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah). Perubahan Penetapan Kinerja Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Trategis	Indikator	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran Tahun 2020
1	2	3	4	5
Mewujudkan Ketatausaha an dan Kearsipan kantor yang Modern dan Berkualitas			Pelayanan Administrasi perkantoran	2,595,771,464
	Terlaksananya Pendistribusia n Surat dan Barang	1 Tahun	Penyediaan Jasa surat-Menyurat	117,652,000
	Terselesainya Pembayaran jasa komunikasi, pemakaian listrik telpon dan air	1 Tahun	Penyediaan jasa komunikasi pemakaian listrik, telpon dan air	375,945,464
	Polis asuransi /pajak bumi bangunan gedung kantor/mess milik Pemprov Kalimantan Tengah	1 Tahun	Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah	90,000,000
	Tersusunnya dokumen pengelolaan administrasi keuangan dan jasa pengelolaan administrasi keuangan	1 Tahun	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	1,256,698,000
	Tersedianya alat kebersihan kantor	1 Tahun	Penyediaan jasa kebersihan kantor	122,005,000
	Tersedianya sejumlah alat tulis kantor dengan cukup	1 Tahun	Penyediaan alat tulis kantor	50,000,000

	Tersedianya sejumlah barang cetakan dan keperluan kantor	1 Tahun	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38,371,000
	Tersedianya komponen peralatan listrik, untuk kantor dan mess	1 Tahun	penyediaan komponen instalasi kantor	21,700,000
	Terselenggara nya pelaksanaan kerja dengan baik	1 Tahun	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30,000,000
	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat	1 Tahun	penyediaan makanan dan minuman	19,500,000
	Laporan Koordinasi tugas rapat koordinasi di provinsi	1 Tahun	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	473,900,000
Mewujudkan sarana dan prasarana kantor/mess yang memadai dan mendukung kinerja organisasi			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,869,096,500
	Tersedianya Kendaraan Operasional	1 Unit	Pengadaan Mobil Jabatan	640,000,000
	Terpeliharanya bangunan kantor/mess Pemrov di Jakarta	1 tahun	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	350,000,000

	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional di Jakarta	1 tahun	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	561,200,000
	Peralatan AC dan kursi tamu	1 Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	317,896,500
Mewujudkan aparatur yang profesional dan disiplin melaksanakan tugas kedinasannya.			Program Peningkatan Disiplin aparatur	0
	Tersedianya pakaian dinas bagi Resepsionis dan Satpam	45 orang	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0
Mewujudkan aparatur yang profesional, disiplin & bertanggung-jawab.			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000
	Terlaksananya pengisian PNS dan Tenaga Kontrak yang mengikuti Bimtek/Workshop/kursus singkat	45 orang	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	50,000,000
Mewujudkan pelayanan prima keprotokolan bagi pejabat Provinsi Dep/Lembaga Tinggi.			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	177,995,000
	Terlaksananya pelayanan protokol/koordinasi ke pusat	1 Tahun	Koordinasi dengan pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	177,995,000

Mewujudkan Pelaksanaan Promosi pariwisata Nusantara di dalam dan di luar Negri			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	45,000,000
	Terlaksannya promosi potensi 14 Kab/Kota Kalimantan Tengah.	14 Kab/Kota	Promosi pembangunan	45,000,000
JUMLAH				4,737,862,964

No.	Program	Anggaran (Rp.)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.595.771.464,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.869.096.500,-
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,-
4	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	177.995.000,-
5	Penyebaran Informasi Kehumasan dan Keprotokolan	45.000.000,-
	Jumlah	4,737,862,964

Total Anggaran perubahan Tahun 2020 untuk Program Prioritas setelah perubahan menjadi berjumlah **Rp. 4,737,862,964,-** (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), di tambah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.375.894.129,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) sehingga semua anggaran tahun 2020 sebesar **Rp. 7.113.757.093,-** (Tujuh Milyar Seratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang dicapai dibandingkan dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dibuat juga dengan maksud sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Dengan demikian pengukuran kinerja kegiatan dibuat sebagai alat untuk menganalisa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pokok dari suatu instansi yang melaksanakan kegiatan tersebut.

Secara umum Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta telah melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan penyelenggara pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang baik dan proposional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja kedinasan dalam rangka memberikan pelayanan dibidang Fasilitasi Masyarakat dan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah. Indikator umum Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adalah adanya suatu tingkat kepuasan pada masyarakat akan tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran. Namun demikian, untuk tahun 2020 ini belum dilakukan survei atas seberapa jauh kepuasan yang diterima oleh masyarakat Luas /tamuh sebagai pihak yang berkepentingan atas layanan yang diberikan oleh Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta.

Dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, disusun dan dilaksanakan oleh Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Tahun 2020 dapat dilakukan pengukuran sebagaimana tercantum dalam Bab ini.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan, kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, karena itu dengan segala kemampuan daya dan upaya Kantor berusaha untuk melaksanakan pengukuran dan evaluasi yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran pengukuran kinerja, evaluasi kinerja kegiatan, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijaksanaan .

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta maka Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan fasilitasi Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah lainnya, menyelenggarakan Protokoler, Promosi Daerah serta pembinaan paguyuban masyarakat daerah dimana tugas pokok dan fungsi adalah membantu Kepala daerah / wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan memfasilitasi hubungan antar lembaga, pembinaan paguyuban masyarakat daerah, promosi dan koordinasi pengelolaan dan pelayanan protokoler.

Dalam konteks tersebut dan sesuai dengan semangat otonomi daerah, maka setiap pelaksanaan pembangunan harus ditekankan pada upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kemampuan dan pemberdayaan seluruh Perangkat Daerah, DPRD, Perangkat Desa, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa dan seluruh elemen dalam masyarakat, serta peningkatan kualitas dan

pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) secara optimal dalam pengelolaan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, ukuran untuk melihat berbagai target/sasaran yang diinginkan sebagaimana diungkapkan terdahulu diperlukan suatu akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diharapkan dapat menunjukkan capaian kinerja suatu kegiatan/program pada suatu unit kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi kinerja setidaknya dapat menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Oleh karena itu evaluasi kinerja dimaksudkan juga untuk memberikan penilaian atas capaian suatu kegiatan / program akhir pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan pembangunan.

Dari hal tersebut, maka sebagai dasar dalam penilaian pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dilakukan pengukuran kinerja dalam rangka memudahkan analisis dan evaluasi lebih lanjut yang dapat dilihat dari Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja.

Atas dasar perumusan pada tabel pengukuran kinerja kegiatan dan table pengukuran pencapaian sasaran sebagaimana tersebut dalam lampiran, maka kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020, dapat dilakukan evaluasi sebagai berikut:

- a. Dari kegiatan pokok pada Unit Kerja/Instansi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Artinya pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan dan mencapai sasaran yang diharapkan baik dilihat dari waktu pelaksanaan, sasaran kuantitatif maupun tingkat aksebilitas terhadap pelayanan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya dan masyarakat pada umumnya. Disamping itu pelaksanaan kegiatan juga terhindar dari **devience structure** dalam pelaksanaan tugas.
- b. Dari segi standar kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, besaran-besaran yang harus dicapai untuk setiap Indikator kinerja; dapat juga dinyatakan sebagai **lower bound target** atau juga dapat dinyatakan

- sebagai **upper bound target**, karena pada sebagian target ada yang bersifat kualitas dan juga bersifat kuantitatif.
- c. Dari pelaksanaan program yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun Pemerintah Pusat. Artinya program yang dijalankan oleh Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terjadi **lind and match** dengan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 - d. Seiring dengan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah dilaksanakan, kebijakan yang dilakukan juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kebijakan yang ditempuh diarahkan untuk menggerakkan seluruh aparatur pemerintah daerah agar mampu mengembangkan potensi masing-masing, agar terjadi regulatory framework bagi aparatur sendiri sekaligus untuk meningkatkan **capacity building and accountable**.
 - e. Pengukuran Pencapaian Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Di Jakarta Tahun Anggaran 2020 diukur berdasarkan perbandingan antara sasaran (target) serta realisasi masing-masing indikator kinerja dari 5 (lima) sasaran strategis pada RENSTRA Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta yakni ; **(1)** Memberikan pelayanan prima di bidang ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah. **(2)** Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar semakin profesional, disiplin dan bertanggung jawab. **(3)** Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan/barang dan pelaporan pencapaian kinerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. **(4)** Meningkatkan profesionalisme keprotokolan dan pelayanan mess. **(5)** Mengembangkan sistem promosi potensi Kalimantan Tengah.

Yang kemudian dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Pengukuran capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis dalam RENSTRA berikut indikatornya dari tahun 2016 – 2021.

Tabel 3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Terwujudnya ketatausahaan dan kearsipan kantor yang modern dan berkualitas.	Mewujudkan ketatausahaan dan kearsipan kantor yang modern dan berkualitas.	115 Laporan	120 Laporan	100 %
Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai dan mendukung kinerja organisasi.	Mewujudkan sarana dan prasarana kantor yang memadai dan mendukung kinerja organisasi.	28 Kamar	28 Kamar	100%
Terjaminnya kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah.	Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah.	7 orang	7 orang	100%
Terwujudnya aparatur yang profesional dan disiplin melaksanakan tugasnya	Mewujudkan aparatur yang profesional dan disiplin melaksanakan tugas.	45 orang	45 Orang	100%
Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan barang yang efektifitas dan efisiensi		50 laporan	57 laporan	100%

Terwujudnya pelayanan prima keprotokolan.	Terlaksananya pelayanan protokol/Koordinasi pusat	50 Kelembagaan	50 Kelembagaan	• 100%
Terwujudnya pelayanan mess setara dengan pelayanan hotel bintang 3.	Meningkatnya Target Pendapatan Daerah	960.000.000,-	142.800.000,-	• 20 %
Terwujudnya potensi Kalimantan Tengah di tingkat nasional dan Internasional	Meningkatnya minat terhadap potensi di 14 Kabupaten/kota di Kalimantan tengah.	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	• 100%

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut dapat dijelaskan dan dievaluasi berdasarkan sasaran yang tertuang dalam Rencana Staregik Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran 1:** Memberikan pelayanan prima di bidang ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah.

Indikator	2019			2020		
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi
• Laporan yang berkualitas dari tahun 2019	• 50 Laporan	• 82 laporan	• 100%	• 115 Laporan	• 121 Laporan	• 100 %
• Jumlah	• 50 Laporan	• 82 laporan	• 100%	• 115 Laporan	• 121 Laporan	• 100 %

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan daya kreatif Pegawai yaitu meningkatnya kualitas Laporan Dalam Pengadministrasian Perkantoran pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta mulai dari Tahun 2019 sampai dengan 2020 per posisi 31 Desember 2019 berjumlah 50 laporan dan sampai dengan posisi 31 Desember 2020 berjumlah 120 Laporan. Dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan.

b. Sasaran 2 :

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar semakin profesional, disiplin dan bertanggung jawab.

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk Meningkatkan Sumber daya Manusia (SDM) untuk dapat melaksanakan tugas secara Profesional sesuai dengan Kompetensi masing-masing Pegawai. Untuk tahun 2020 Program Ini dapat terlaksana dengan baik dengan mengadakan Bimtek "Excellent Quality Service" untuk Tenaga Kontrak dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Badan Penghubung serta meningkatkan kualitas dalam laporan keuangan berupa Bimtek Keuangan pada BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya. Dan terakhir mengikuti Bimtek Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang diadakan Bappedalitbang di Palangka Raya.

c. Sasaran 3 :

Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan/barang dan pelaporan pencapaian kinerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah serta mewujudkan sistem pelaporan pencapaian kinerja yang transparan dan akuntabel. Walaupun dalam prosesnya terjadi beberapa hal yang menghambat pelaksanaannya, Dalam hal ini kurangnya koordinasi Sub Bidang Perencanaan Pengendalian dengan Kepala Badan, sehingga mengakibatkan capaian kinerja yang sudah disepakati bersama tidak berjalan dengan maksimal.

d. Sasaran 4 :

Meningkatkan profesionalisme keprotokolan dan pelayanan mess.

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk Terwujudnya pelayanan prima keprotokolan serta terwujudnya pelayanan mess serta dengan pelayanan hotel bintang 3 dalam rangka usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Penerimaan retribusi Mess. Namun dalam hal ini masih perlunya peningkatan fasilitas mess dengan menambah fasilitas Sarapan Tamu Mess Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pendapatan PAD Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta berupa mess dari tahun ke tahun dapat dilihat dari table berikut :

Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Total PAD 5 tahun	
Target	Realisa si	Target	Realisa si	Target	Realisa si	Target	Realisa si	Target	Realisa si	Target	Realisa si
650.00 0.000	633.15 0.000	670.00 0.000	722.40 0.000	957.00 0.000	701.15 0.000	960.00 0.000	538.70 0.000	960.00 0.000	142.80 0.000	4.197. 000.00 0	2.738. 200.00 0

e. Sasaran 5 :

Mengembangkan sistem promosi potensi Kalimantan Tengah

Pemahaman sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan Terwujudnya potensi Kalimantan Tengah di tingkat nasional dan Internasional. Dalam hal ini tahun 2020 telah terlaksana berupa Pembuatan Kalender tahun 2021 dan Brosur Mess dengan desain baru. Selain itu, kegiatan promosi juga dilaksanakan melalui Platform-platform media social untuk menyesuaikan zaman yang sudah serba digital, Sehingga media yang disajikan lebih menarik minat bagi yang membutuhkan.

Untuk melaksanakan berbagai program kegiatan, terutama Program Kegiatan Strategis, pada Tahun 2020 secara keseluruhan terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara alokasi tersebut dengan serapannya. Hal ini dikarenakan terhadap program kegiatan yang telah dianggarkan tersebut dilakukan sebagaimana pelayanan, sehingga tanpa mengganggu pelaksanaan program kegiatan terutama program kegiatan

strategis. Hal ini dapat terlihat pada semua output kegiatan yang mana telah terealisasi/terlaksana sepenuhnya (100 %).

Apabila dilihat dari arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020 ini, titik beratnya adalah pada upaya meningkatkan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan SKPD dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada tuntutan kebutuhan pengembangan berbagai sektor pembangunan daerah sekaligus untuk menciptakan *good governance* serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Mess yang ada di Jakarta bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dilihat dari nilai capaian masing-masing indikator pada masing-masing kegiatan, terlihat tidak fluktuatif, artinya terjadi trend yang cukup baik yaitu melebihi 100%. Hal ini menggambarkan terjadinya tingkat aksesibilitas yang tinggi pada masing-masing kegiatan serta lebih terfokus sehingga adanya keserasian antara kegiatan, program dan kebijakan secara simultan dalam satu unit kerja/instansi dengan berbagai instansi lainnya. Bahkan ada) tambahan kegiatan yang sangat strategis dan mendesak guna peningkatan pelayanan dan transparansi dalam tertibnya administrasi perkantoran, yaitu berupa Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Pakaian Dinas, dan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Dari nilai capaian masing-masing kelompok indikator kinerja baik kinerja kegiatan, program maupun kebijakan tersebut, juga dapat digambarkan bahwa kinerja yang dicapai, cukup berhasil dalam pelaksanaannya. Ini artinya pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan mampu dilaksanakan sesuai yang ditetapkan, tepat sasaran dan terencana. Secara umum pelayanan dan pelaksanaan tugas instansi mampu diwujudkan sesuai dengan harapan dan keinginan pihak-pihak yang membutuhkan.

Seperti dikatakan terdahulu bahwa pencapaian kinerja untuk masing-masing kegiatan, program dan kebijakan tidak lepas dari bagaimana membentuk aparatur yang berpengetahuan (***knowledge oriented civil serven***) atau ***learning civil serven***. Dengan demikian,

walaupun dalam pelaksanaan kinerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta dapat dikategorikan berhasil, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa hambatan/kendala. Salah satunya yaitu kurangnya koordinasi antara Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian dengan Kepala Badan, sehingga mengakibatkan capaian kinerja yang sudah disepakati bersama tidak berjalan dengan maksimal.

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah pada Badan Penghubung Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Uraian	Target (Rp.)	Realisasi Keuangan	
		Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Pendapatan 2020	960,000,000	142,800,000	20

1. Anggaran Pendapatan

Pada tahun 2020, Badan penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta telah ditarget pendapatan sebesar Rp. 960.000.000,- yang terdiri 2 (dua) sumber penerimaan yaitu :

- ❖ Retribusi Mess Jl. Kembang I No I Kwitang Jakarta Pusat,
- ❖ Retribusi Mess Jalan Jambu Cut Nyak dien Mentang Jakarta Pusat.

Ditargetkan penerimaannya sebesar Rp. 960.000.000,-

Masing-masing jenis pendapatan tersebut, telah terealisasi sebagai berikut :

- * Retribusi penginapan/mess Tahun 2020 per bulan November 2020 terealisasi sebesar Rp. 142.800.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Delapan ratus Ribu Rupiah).

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kuangan	
		Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Penyediaan jasa surat menyurat	117,652,000	117,650,590	100
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	375,945,464	269,088,522	72
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	90,000,000	79,538,698	88
Penyediaan jasa administrasi keuangan	1,256,698,000	1,250,535,821	100
Penyediaan jasa kebersihan kantor	122,005,000	99,979,100	82
Penyediaan alat tulis kantor	50,000,000	49,826,000	100
Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	38,371,000	28,426,550	74
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	21,700,000	21,700,000	100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30,000,000	23,400,000	78
Penyediaan makanan dan minuman	19,500,000	19,285,000	99
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	473,900,000	419,758,794	89
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
Pengadaan mobil jabatan	640,000,000	635,000,000	99
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	350,000,000	344,439,200	98
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	561,200,000	498,102,755	89
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	317,896,500	289,916,370	91
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50,000,000	49,300,000	99

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah			
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	177,995,000	175,548,600	99
Program Penyebaran Informasi, Kehumasan dan Keprotokolan			
Promosi pembangunan	45,000,000	44,900,000	100

2. Anggaran Belanja Langsung

Pada tahun anggaran 2020, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta melaksanakan 5 (Lima) program dan 18 (delapan belas) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp4.737.862.964,-** yang dibiayai dengan Belanja Langsung.

Adapun realisasi program dan kegiatan yang dibiayai dari Belanja Langsung tersebut adalah :

- * Realisasi fisik kegiatan 100 % ;
- * Realisasi keuangan sebesar **Rp. 4.416.396.000,-** atau **93 %**

Sehingga pada tahun anggaran 2020, terdapat sisa dana yang tidak terserap sebesar **Rp. 321.466.964,-** atau **7%**

Adanya sisa dana yang tidak terserap dalam tahun anggaran 2020 karena adanya efisien pada beberapa kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, pembayaran penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional serta Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

Kendala-kendala yang dirasakan secara signifikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 tidak ada, namun kendala Perencanaan anggaran yang diminimalisasikan dalam DPA

murni sehingga SOPD harus menunggu DPA-SKPD Perubahan yang akan membuat pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan batas waktu yang sedikit, sehingga tidak maksimal dalam menggunakan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan kantor. Tidak tepatnya jadwal pelaksanaan masih dirasakan karena adanya ketergantungan dengan pihak ketiga. Serta kurangnya anggaran pada beberapa kegiatan seperti pengiriman barang, BBM, E-toll, dan beberapa kegiatan lainnya mengakibatkan pelaksanaan fasilitasi pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kurang maksimal.

Realisasi Belanja Langsung tersebut yang mencapai 93% keuangan dan fisik telah mencapai 100% berarti, pelaksanaan anggaran Belanja Langsung telah sesuai yang direncanakan dan mampu mendukung serta menunjang seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, walaupun dalam ukuran kinerja, perlu lebih ditingkatkan dalam penyediaan anggaran tahun-tahun berikutnya terutama pada anggaran yang digunakan untuk peningkatan dan pengembangan SDM baik melalui pendidikan kader, diklat teknis dan fungsional lainnya, dikarenakan Badan Penghubung Masih kekurangan pegawai-pegawai yang professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Jika dilihat dari penyerapan anggaran belanja langsung tersebut, menunjukkan bahwa dalam tahun anggaran 2020 terjadi surplus anggaran dengan kisaran 7%. Gambaran ini menunjukkan secara umum pelaksanaan program/kegiatan pembangunan telah terhindar dari *miss management of project*.

Seperti telah diuraikan terdahulu, bahwa evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan diharapkan dapat menunjukkan capaian kinerja suatu kegiatan/program pada suatu unit kerja tertentu dalam suatu kurun waktu tertentu pula. Evaluasi kinerja program/kegiatan pembangunan setidaknya dapat menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan program/kegiatan dan anggaran. Oleh karena itu, evaluasi kinerja

dimaksudkan juga untuk memberikan penilaian atas capaian suatu kegiatan/program akhir pelaksanaan pembangunan.

Dengan melihat dan memperhatikan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta tersebut, maka secara fisik, target dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan tersebut telah dapat dicapai, namun apabila dilihat dari aspek penyerapan dana-dana pembangunan secara keseluruhan, masih ada kegiatan-kegiatan pembangunan yang penyerapan dananya belum mencapai target (100%) dikarenakan ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang secara ril memang tidak dapat dilaksanakan (jika kegiatan dilaksanakan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sah). Ini artinya masih terjadinya anggaran/dana yang tersisa (tetapi pelaksanaan kegiatan fisiknya telah selesai).

Adapun Perkembangan Pagu Anggaran sejak tahun 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti table di bawah ini :

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi	%
2012	2.561.000.000	2.266.345.850	88.50%
2013	2.600.000.000	2.302.247.341	88.55%
2014	4.498.000.000	3.976.072.937	88.40%
2015	4.767.300.000	4.186.231.368	89.52%
2016	4.167.761.000	4.107.960.043	98.57 %
2017	4.633.520.000	4.107.960.043	88%
2018	6.140.742.381	5.595.763.095	91%
2019	4.862.768.641	4.553.054.249	93%
2020	4.737.862.964	4.416.396.000	93%
Total	38.968.954.986	35.512.030.926	92 %

Dilihat dari aspek *Activities Schedule*, maka penyusunan jadwal pelaksanaan program/kegiatan sangat berpengaruh terhadap penyelesaian akhir pelaksanaan program/kegiatan. Dengan melihat perbandingan antara rencana dengan hasil yang telah dicapai (realisasi kegiatan pelaksanaan/program pembangunan), maka secara umum kegiatan/program pembangunan yang telah disusun secara lebih awal oleh pelaksana program/kegiatan sebelum kegiatan-kegiatan dilaksanakan (pada kenyataannya ada penggeseran waktu/schedule dari yang direncanakan), pelaksanaan dapat lebih tepat sasaran.

Dengan melihat formulasi evaluasi kinerja yaitu perhitungan Nilai Capaian Kegiatan masing-masing program/kegiatan pembangunan tahun anggaran 2020 maka tingkat pencapaian kinerja (Nilai akhir capaian kinerja) pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2020 di Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, mencapai rata-rata 100 % fisik, dan keuangan mencapai antara 93% yang berarti pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dapat dinyatakan/digolongkan berhasil dalam pelaksanaannya (sesuai dengan criteria pembobotan, skala nilai 90% s/d 100% dinyatakan kesimpulan evaluasi berhasil).

BAB IV

PENUTUP

Secara umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja yang rata-rata telah melebihi target RENSTRA terutama pada sektor-sektor yang menjadi target dan sasaran strategis pada tahun 2020.

A. KESIMPULAN

1. Program dan Kegiatan secara keseluruhan telah berjalan dengan baik (Berdasarkan Realisasi Fisik yang sudah mencapai 100%), walaupun masih ada beberapa kegiatan yang belum sepenuhnya terfasilitasi oleh anggaran yang ada karena dirasa masih belum sesuai dengan kebutuhan;
2. Dilihat dari sisi pencapaian akuntabilitas kinerja berikut indikator kinerjanya secara umum cukup bagus, walau masih ada beberapa indikator kinerja yang masih dibawah target, tapi secara keseluruhan telah memenuhi target;
3. Realisasi keuangan pada tahun 2020 untuk mendukung semua sasaran terealisasi sebesar **Rp. 4.416.396.000,-** (Empat Milyar empat ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 93% dari pagu dana sebesar Rp. 4.737.862.964,- (Empat Milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) sehingga sisa Anggaran **Rp. 321.466.964,-** (Tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) atau 7%.

B. SARAN

1. Rencana program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan di lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta hendaknya dapat terus disempurnakan dan disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas yang dihadapi. Di samping itu langkah penyebarluasan dan implementasi secara nyata

pelaksanaan berbagai kegiatan dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.


2. Perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, karena masih kekurangan SDM yang professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran di lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan, agar tidak ada lagi perbedaan pendapat yang dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama.
4. Memaksimalkan Fasilitas Absensi Fingerprints yang ada, sehingga Pegawai bisa lebih disiplin dan tepat waktu.
5. Perlu upaya-upaya strategis dan inovatif agar kegiatan di Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta dapat dilaksanakan secara optimal melalui pendekatan yang aktif, interaktif dan partisipatif.
6. Perlunya koordinasi dan bantuan pada kondisi keterbatasan sumber daya, yang dalam hal ini keterbatasan sumber data informasi. Sehingga Laporan Kinerja kedepannya, lebih akuntabel, reliabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Kebijakan TAPD dalam penentuan anggaran prioritas Badan Penghubung khususnya dalam kegiatan rutin kantor sehingga kegiatan tidak menunggu persediaan anggaran hasil DPA perubahan sedangkan kebutuhan rutin sifatnya sangat mendesak;
8. Dana yang tersedia untuk biaya pendidikan dan latihan perlu disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas aparatur untuk meningkatkan kinerja instansi secara keseluruhan;
9. Sarana dan prasarana kinerja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan;
10. Belum tersedianya data yang akurat secara optimal, sebagai bahan perencanaan;

11. Anggaran yang tersedia untuk pengiriman barang, BBM dan E-Toll perlu disesuaikan dengan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan fasilitasi pelayanan di Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Tahun 2020, dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan sekaligus sebagai alat kendali penilaian kualitas kinerja.

Jakarta, 18 Februari 2021




KEPALA BADAN,

SAWUN, S.Sos, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19700101 199303 1 021

LAMPIRAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Perubahan Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
		Penyediaan jasa surat menyurat	42,652,000	117,652,000	117,652,000	117,650,590	100	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	350,000,000	375,945,464	375,945,464	269,088,522	72	
		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	90,000,000	90,000,000	90,000,000	79,538,698	88	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	1,168,910,000	1,256,698,000	1,256,698,000	1,250,535,821	100	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	50,000,000	122,005,000	122,005,000	99,979,100	82	
		Penyediaan alat tulis kantor	50,000,000	50,000,000	50,000,000	49,826,000	100	
		Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	38,371,000	38,371,000	38,371,000	28,426,550	74	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	21,700,000	21,700,000	21,700,000	21,700,000	100	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	54,440,000	-	-	-	-	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	23,400,000	78	
		Penyediaan makanan dan minuman	19,500,000	19,500,000	19,500,000	19,285,000	99	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	420,100,000	473,900,000	473,900,000	419,758,794	89	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
		Pengadaan mobil jabatan	767,348,000	640,000,000	640,000,000	635,000,000	99	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	270,000,000	350,000,000	350,000,000	344,439,200	98	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	540,000,000	561,200,000	561,200,000	498,102,755	89	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	252,896,500	317,896,500	317,896,500	289,916,370	91	

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Perubahan Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
2.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	20,000,000	-	-	-		
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	49,300,000	99	
4.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah							
		Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	216,000,000	177,995,000	177,995,000	175,548,600	99	
5.	Program Penyebaran Informasi, Kehumasan dan Keprotokolan							
		Promosi pembangunan	60,000,000	45,000,000	45,000,000	44,900,000	100	


KEPALA BADAN,

SAWUN, S.Sos, M.Si.
 Pembina Tk.I
 NIP. 19700101 199303 1 021